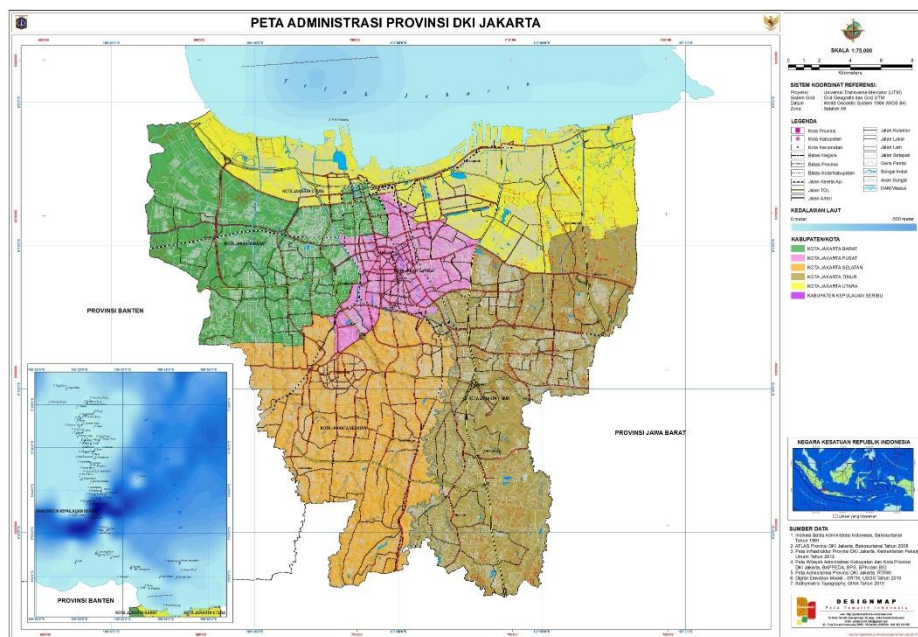


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

2.1.1 KONDISI GEOGRAFIS



Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta,

sumber: petatematikindo.wordpress.com

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, dengan total luas wilayah mencapai 662,33 km². Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas 48,13 km², Jakarta Utara seluas 146,66 km², Jakarta Barat seluas 129,54 km², Jakarta Selatan seluas 141,37 km², dan Jakarta Timur seluas 188,03 km² (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023b). Sementara itu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki luas area sebesar 8,70 km². Bagian utara Jakarta memiliki pantai yang membentang sepanjang 32 km, yang berfungsi sebagai muara bagi 13 sungai, 2 kanal, serta

2 *floodway*. Di sebelah selatan dan timur, Jakarta berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi; di sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang; serta di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (jakarta.go.id, 2024). Secara umum, iklim Kota Jakarta tergolong panas, dengan suhu udara rata-rata mencapai 28,5°C. Suhu maksimum berkisar antara 33,8°C hingga 35,2°C pada siang hari, sedangkan suhu minimum berkisar antara 23,0°C hingga 24,6°C pada malam hari. Pada tahun 2022, suhu maksimum di Provinsi DKI Jakarta mencapai 35,4°C, sedangkan suhu minimum tercatat sebesar 23,0°C, (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023b).

2.1.2 KONDISI DEMOGRAFI

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta
(Jiwa), 2022-2023

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)	
	2022	2023
Kep Seribu	28.262	28.523
Jakarta Selatan	2.234.262	2.235.606
Jakarta Timur	3.066.074	3.079.618
Jakarta Pusat	1.053.482	1.049.314
Jakarta Barat	2.458.707	2.470.054
Jakarta Utara	1.799.220	1.808.985
DKI Jakarta	10.640.007	10.672.100

Sumber: BPS - 2020, Hasil SP 2021-2023: Proyeksi Penduduk Hasil SP2020

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa total populasi DKI Jakarta mengalami peningkatan dari 10.640.007 jiwa pada tahun 2022 menjadi 10.672.100 jiwa pada tahun 2023, bertambah sebanyak 32.093 jiwa atau sekitar 0,3%. Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, baik pada tahun 2022 (3.066.074 jiwa) maupun 2023 (3.079.618 jiwa), diikuti oleh Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sebagian besar wilayah mengalami pertumbuhan penduduk, kecuali Jakarta Pusat yang mengalami penurunan sebanyak 4.168 jiwa antara 2022-2023.

Tabel 2.2
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di
Provinsi DKI Jakarta, 2022

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) di Provinsi DKI Jakarta
	2022
Mobil Penumpang	3.766.059
Bus	37.180
Truk	748.395
Sepeda Motor	17.304.447
Jumlah	21.856.081

Sumber: BPS – Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas POLRI)

Berdasarkan Tabel 2.2 mengenai Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, terlihat adanya ketimpangan antara jumlah kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan umum yakni bus hanya berjumlah 37.180 unit, jumlah yang sangat minim jika dibandingkan dengan total kendaraan yang mencapai 21.856.081 unit. Bus sebagai

transportasi umum utama hanya menyumbang sekitar 0,17% dari total kendaraan. Kondisi ini menggambarkan ketergantungan masyarakat Jakarta yang sangat tinggi pada kendaraan pribadi dan menjelaskan mengapa kemacetan menjadi masalah kronis di ibukota. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk menambah jenis transportasi publik yang dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti adanya KRL, MRT, LRT, serta bus pengumpan atau angkutan umum lainnya guna meningkatkan penggunaan transportasi publik di DKI Jakarta.

2.2 SISTEM TRANSPORTASI DI DKI JAKARTA

Sistem transportasi publik di DKI Jakarta telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir sebagai upaya pemerintah mengatasi permasalahan kemacetan kronis di Ibukota. Jakarta memiliki beberapa moda transportasi publik utama yang terintegrasi dalam satu sistem. TransJakarta, yang diluncurkan pada tahun 2004, menjadi sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan kini memiliki lebih dari 13 koridor dengan panjang lintasan mencapai lebih dari 250 km, melayani jutaan penumpang setiap bulannya (Transjakarta, 2023). Sistem ini memiliki jalur khusus yang didesain untuk menghindari kemacetan lalu lintas umum.

MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta atau lebih dikenal sebagai MRT fase I mulai beroperasi pada Maret 2019, menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang 15,7 km dengan 13 stasiun (MRT Jakarta, 2024). Sementara pembangunan MRT fase II dari Bundaran HI ke Kota masih

berlangsung dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. LRT (*Light Rail Transit*) Jakarta juga telah beroperasi sejak 2019, menghubungkan kawasan Kelapa Gading dengan area Asian Games di Velodrome sepanjang 5,8 km (LRT Jakarta, 2024). Selain itu, terdapat KRL Commuter Line yang dioperasikan oleh PT KAI Commuter yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota satelitnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Integrasi antar moda transportasi publik di Jakarta terus ditingkatkan melalui sistem pembayaran terpadu seperti kartu JakLingko dan pengembangan infrastruktur penghubung seperti jembatan penyeberangan terintegrasi di beberapa stasiun dan halte. Pemerintah DKI Jakarta juga telah menerapkan sistem transportasi angkutan umum seperti Jaklingko (untuk layanan bus pengumpan) yang memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi publik. Meski demikian, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan DKI Jakarta, penggunaan transportasi publik di Jakarta masih berkisar 20-25% dari total pergerakan, jauh dari target ideal 60% untuk kota metropolitan (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2024).

Tantangan utama sistem transportasi publik Jakarta meliputi cakupan jaringan yang belum merata, keterbatasan kapasitas, dan budaya masyarakat yang masih mengandalkan kendaraan pribadi. Berdasarkan data BPS dan Korlantas Polri tahun 2022, jumlah kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 21.070.506 unit (96,4% dari total kendaraan), sementara bus umum hanya (0,17%) atau 37.180 unit (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023a). Kesenjangan ini menjadi indikasi bahwa meski infrastruktur transportasi publik terus

berkembang, masih diperlukan upaya lebih untuk mengubah pola mobilitas masyarakat Jakarta dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

2.3 PROFIL PT TRANSPORTASI JAKARTA (TRANSJAKARTA)

PT TransJakarta adalah perusahaan yang berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi publik terintegrasi, dengan tujuan utama untuk mempermudah aksesibilitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Transportasi Jakarta memiliki kepemilikan saham yang didominasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,70%, sementara PT Jakarta Propertindo memiliki sisa saham sebesar 0,30% (Dinas Perhubungan, 2024). Perusahaan ini didirikan pada 27 Maret 2014, dan mengambil alih pengelolaan armada bus Transjakarta yang sebelumnya berada di bawah Badan Pengelola Transjakarta Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta serta Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta .

Sebagai BUMD yang beroperasi dalam sektor Bus Rapid Transit (BRT), armada TransJakarta merupakan yang pertama di Asia Tenggara dan telah beroperasi sejak tahun 2004. Saat ini, selain layanan BRT, TransJakarta juga menyediakan berbagai jenis transportasi lainnya, termasuk Mikrotrans, Minitrans, dan Metrotrans.

2.3.1 VISI

Visi PT Transjakarta adalah untuk menghubungkan kehidupan Jakarta, yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan sistem transportasi

yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat (Transjakarta, 2023). Dalam konteks ini, "menghubungkan kehidupan" berarti tidak hanya menyediakan layanan transportasi yang memadai, tetapi juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta, termasuk aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

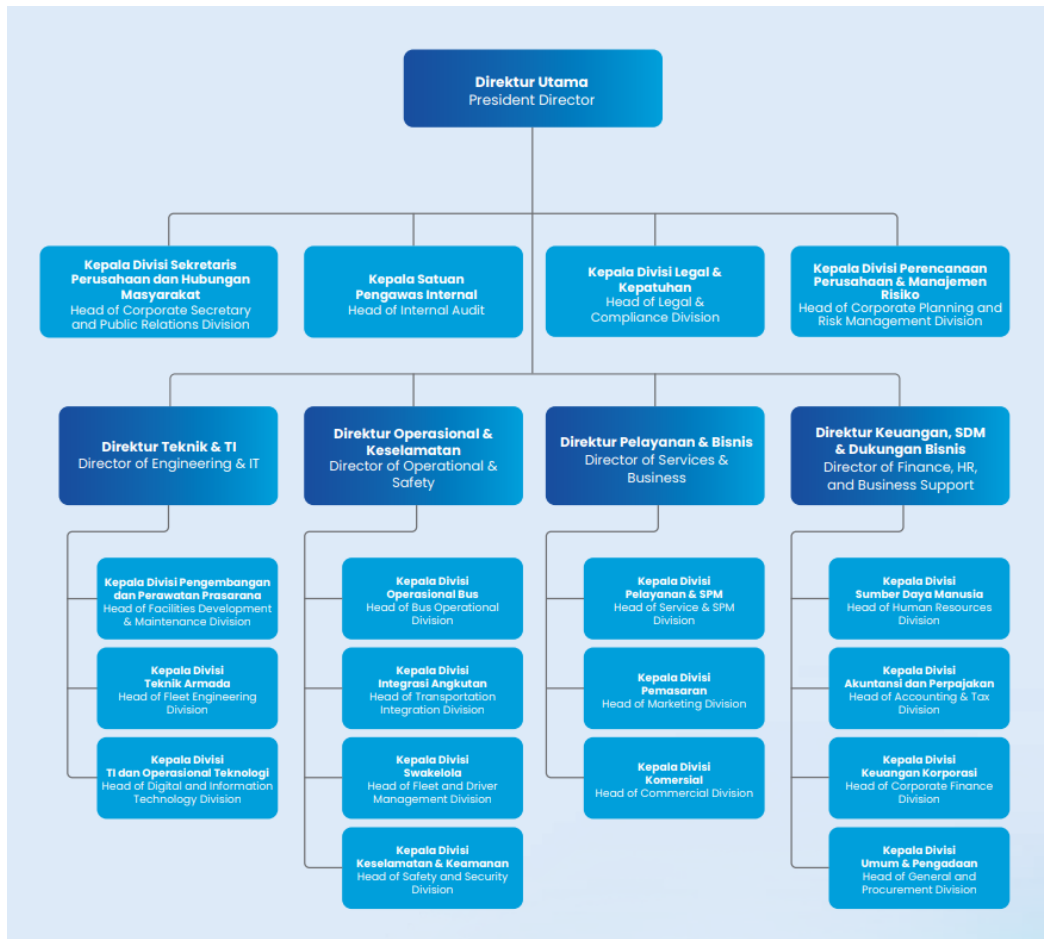
2.3.2 MISI

Misi PT Transjakarta yaitu bersama-sama menyediakan layanan transportasi terintegrasi yang memudahkan dan membahagiakan kehidupan Jakarta yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan sistem transportasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna (Transjakarta, 2023). Dengan fokus pada integrasi berbagai moda transportasi, perusahaan berusaha untuk mempermudah aksesibilitas dan mobilitas, sehingga pengguna dapat berpindah dengan lancar antara bus, mikrotrans, dan moda transportasi lainnya.

2.3.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi PT Transjakarta terdiri dari beberapa divisi yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik. Pada struktur organisasi ini menunjukkan hierarki organisasi dengan Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi. Dibawah Direktur Utama, terdapat 4 direktur, yaitu: Direktur Teknik & TI, Direktur Operasional & Keselamatan, Direktur Pelayanan & Bisnis, Direktur Keuangan, SDM & Dukungan Bisnis. Setiap direktur bertanggung jawab atas divisi-divisi yang berada di bawahnya, yang

dijabarkan dalam diagram organisasi. PT Transjakarta berkomitmen untuk terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Transportasi Jakarta (per 31 Desember 2023),

sumber: Laporan tahunan Transjakarta 2023

2.3.4 PERAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Peran, tugas, dan fungsi PT Transportasi Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4 Tahun 2014 mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas TransJakarta. Secara umum, berikut adalah gambaran mengenai peran, tugas, dan fungsi PT Transportasi Jakarta, yaitu:

1. Penugasan, pengoperasian, dan perawatan sarana sistem BRT
2. Pembangunan, pengoperasian, dan perawatan sistem manajemen pendukung
3. Perawatan halte Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB)
4. Pengembangan pengelolaan bisnis atas aset
5. Pengembangan dan pengelolaan properti

2.4 ANGKUTAN UMUM MIKROTRANS

Mikrotrans merupakan inovasi signifikan dalam ekosistem transportasi publik Jakarta yang dikelola oleh PT Transjakarta. Layanan ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan aksesibilitas di area-area yang tidak terjangkau oleh armada bus besar, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk dengan jalan-jalan sempit atau gang-gang yang tidak dapat dilalui kendaraan besar. Sebagai layanan feeder (pengumpan), Mikrotrans berperan penting dalam mewujudkan konsep transportasi terintegrasi di Jakarta. Kendaraan Mikrotrans yang berkapasitas 10-11 penumpang ini dioperasikan dengan rute-rute strategis yang menghubungkan pemukiman warga dengan halte TransJakarta, stasiun MRT, stasiun LRT, atau pusat-pusat aktivitas seperti sekolah, pasar, dan perkantoran.

Keunggulan utama Mikrotrans adalah sistem pembayaran nontunai (*cashless*) melalui mekanisme tap-in tap-out menggunakan kartu elektronik pada mesin EDC yang tersedia di dalam kendaraan. Yang menarik, PT Transjakarta menerapkan kebijakan tarif Rp 0 (gratis) untuk semua rute

Mikrotrans, sebagai bagian dari strategi untuk mendorong penggunaan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Kendaraan-kendaraan ini dilengkapi dengan sistem pemantauan GPS untuk memudahkan pelacakan dan pengaturan headway (jarak waktu antar kendaraan). Jam operasional Mikrotrans umumnya dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB, menyesuaikan dengan pola pergerakan masyarakat Jakarta.

Tabel 2.3
Rute/Lintasan Layanan Mikrotrans Menurut Wilayah di DKI Jakarta
Tahun 2024

Wilayah Layanan Mikrotrans	Rute Layanan	Jumlah Rute
Jakarta Selatan	JAK 03, 09, 11, 12, 18, 31, 31, 43B, 43C, 44, 45, 46, 47, 48A, 48B, 49, 64, 86, 105	19 Rute
Jakarta Timur	JAK 02, 05, 06, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 85, 100, 106, 112	33 Rute
Jakarta Pusat	JAK 07, 08, 10, 10A, 10B, 14, 23, 24, 61	9 Rute
Jakarta Barat	JAK 04, 07, 08, 09, 30, 50, 51, 52, 53, 54, 56	11 Rute
Jakarta Utara	JAK 13, 14, 29, 30, 33, 60, 61, 77, 88, 89, 90, 110A, 113, 115, 117, 118, 120	17 Rute
DKI Jakarta		89 Rute

Sumber: diolah oleh peneliti

Perkembangan layanan Mikrotrans terlihat dari peningkatan jumlah armada dan rute dari tahun ke tahun. Awalnya diperkenalkan dengan beberapa rute percontohan pada tahun 2017, kini Mikrotrans telah mengoperasikan sebanyak 89 rute dan 2867 armada yang beroperasi sampai dengan Desember 2024. Ini

merupakan bagian dari strategi PT Transjakarta untuk mencapai target 30 menit perjalanan maksimum dari rumah ke halte bus utama.

Tabel 2.4

Jumlah Pengguna Layanan Mikrotrans Tahun 2022-2024

Jumlah Pengguna Layanan Mikrotrans Tahun 2022-2024			TOTAL
2022	2023	2024	
66,324,710	112,379,110	138,205,709	316,909,529

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel 2.4 tentang Jumlah Pelanggan Mikrotrans Tahun 2022-2024, dapat dijelaskan bahwa jumlah penumpang Mikrotrans menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode tiga tahun tersebut. Pada tahun 2022, jumlah pelanggan Mikrotrans tercatat sebanyak 66.324.710 orang. Kemudian pada tahun 2023, terjadi peningkatan drastis mencapai 112.379.110 orang, yang berarti ada kenaikan sebesar 46.054.400 orang atau sekitar 69,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana jumlah pelanggan Mikrotrans mencapai 138.205.709 orang, bertambah sebanyak 25.826.599 orang atau sekitar 23% dibandingkan tahun 2023.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu tiga tahun (2022-2024), total pelanggan Mikrotrans tercatat sebanyak 316.909.529 orang. Peningkatan jumlah pelanggan dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai 71.881.999 orang atau sekitar 108,4%, yang menunjukkan pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dalam jangka waktu tersebut. Tren peningkatan yang konsisten ini

mengindikasikan bahwa Mikrotrans semakin diterima dan diminati oleh masyarakat sebagai salah satu moda transportasi umum di DKI Jakarta. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan pengembangan Mikrotrans sebagai solusi transportasi yang melayani rute-rute pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kawasan pemukiman dengan transportasi umum utama seperti TransJakarta, MRT, dan LRT.

2.5 KEBIJAKAN LAYANAN MIKROTRANS

Pelayanan mikrotrans dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal atau SPM yang merupakan pedoman bagi penyelenggaraan layanan angkutan umum Transjakarta. SPM berfungsi sebagai tolok ukur penilaian kualitas pelayanan, sehingga dapat tercapai pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Penetapan SPM diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk layanan mikotrans di mana pengembangan fasilitas sarana dan prasarana Mikrotrans harus memenuhi prinsip:

- a. Keamanan, kriteria dasar yang harus dipenuhi agar pengguna jasa dan petugas layanan yang sedang bertugas dapat terhindar dari gangguan tindakan melawan hukum dan/atau perasaan takut. Adapun aspek keamanan dinilai dari adanya:
 - 1) Identitas kendaraan
 - 2) Tanda pengenalan pengemudi dan seragam awak kendaraan
 - 3) Kegelapan Kaca Film

- 4) Televisi Sirkuit Tertutup (Closed Circuit Television/ CCTV
 - 5) SOP Penanganan Keamanan
 - 6) Informasi Gangguan Keamanan
 - 7) Stiker Larangan Kegiatan
- b. Keselamatan, merupakan pemenuhan standar minimal untuk menghindari risiko terjadinya kecelakaan atau keadaan darurat yang disebabkan oleh faktor manusia, fasilitas, dan faktor eksternal. Adapun aspek keselamatan dilihat dari:
- 1) SOP Pengoperasian Kendaraan
 - 2) Tata Cara Mengemudi
 - 3) Jam Istirahat Pengemudi
 - 4) Kelayakan Kendaraan
 - 5) Kompetensi Pengemudi
 - 6) Fasilitas Keselamatan
 - 7) Fasilitas Keselamatan
 - 8) Pintu Keluar dan/atau Masuk Penumpang
- c. Kenyamanan, sebagai standar minimal yang harus dipenuhi untuk menciptakan suasana nyaman, bersih, dan indah yang dapat diterima oleh pengguna layanan. Adapun aspek kenyamanan dilihat dari:
- 1) Lampu Penerangan
 - 2) Kepadatan
 - 3) Fasilitas Pengatur Suhu Ruangan
 - 4) Batas Barang Bawaan

5) Kebersihan dan Kerapian

- d. Kesetaraan, merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memastikan setaranya akses dalam pelayanan dan fasilitas bagi pengguna layanan yang termasuk di dalamnya penyandang disabilitas, masyarakat lanjut usia, anak, dan wanita hamil. Adapun aspek kesetaraan dilihat dari adanya:

1) SOP Inklusivitas

2) Kursi Prioritas

- e. Keteraturan, sebagai kriteria dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan kepastian, termasuk mengenai waktu keberangkatan dan kedatangan bus, serta ketersediaan fasilitas informasi perjalanan bagi para pengguna jasa. Adapun aspek keteraturan dilihat dari:

1) Waktu Kedatangan (Headway)

2) Kecepatan Perjalanan

3) Informasi Pelayanan

4) Kendaraan yang Beroperasi

5) Kondisi Kendaraan

6) Dokumen Perjalanan

7) Sistem Pemosisi Global (Global Positioning System/GPS)

8) Lokasi Pengendapan

9) Lokasi Pengaturan Waktu Keberangkatan

10) Pos Petugas Pengaturan Waktu Keberangkatan

11) Waktu Berhenti

- 12) Layanan Operasional
- 13) Fasilitas Penyimpanan Kendaraan
- 14) Mesin Pembaca Kartu
- 15) Ketersediaan Bus Stop
- 16) Pengaduan Kinerja Layanan

Dalam kebijakan layanan, Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Transjakarta. Kepala Dinas Perhubungan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian SPM oleh perusahaan setiap tiga bulan atau kapan pun diperlukan. Proses pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek, seperti pemenuhan layanan angkutan sesuai dengan jenis layanan, persyaratan teknis dan kelayakan operasi Transjakarta, frekuensi perjalanan yang tercapai, rute layanan Transjakarta, jarak rute, faktor muatan pada rute layanan, jumlah armada bus yang beroperasi, jumlah pengguna jasa serta tingkat keterangkutan mereka, serta kondisi prasarana dan sarana, dengan mempertimbangkan kewenangan perusahaan dalam mengendalikan prasarana tersebut. Perusahaan wajib menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan, atau sesuai kebutuhan, mengenai pelaksanaan, penerapan, dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas Perhubungan.